

DAYA TARIK INVESTASI DAN PUNGLI DI DIY

Mudrajad Kuncoro

Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada

Anggi Rahajeng

Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada

Abstract

This paper attempts to explore to what extent the current regime has changed the investment attractiveness and illegal charges in doing business in Yogyakarta Special Region (DIY). We focus on five factors that lead to regional investment attractiveness, in particular institutional, social-political, regional economy, labor and productivity, and physical infrastructure factor. This paper combined KPPOD method to analyze investment attractiveness at regional level and Analytical Hierarchy Process (AHP) to examine the business climate in DIY. We find that noneconomic factor, rather than economic factor, constituted a key factor based on business perspective. The institutional factor is found as the most important factor, followed by physical infrastructure, and social political factor. Interestingly, business community perceived illegal charges persistently high in DIY, in particular public service, court, and police. Therefore, we argue some suggested corrective actions based the surveys are badly needed for local governments in DIY.

Key words: AHP, pungli, daya tarik investasi, peringkat, KPPOD

PENDAHULUAN

Daya saing suatu negara merupakan topik yang menarik untuk dicermati karena globalisasi mengakibatkan persaingan dalam memperebutkan faktor-faktor produksi semakin meningkat tajam dan tidak lagi dibatasi oleh batas geografis. Daya saing Indonesia menurut *World Competitiveness Report* semakin menurun dari tahun ke tahun dan berada pada level bawah dari 59 negara yang diteliti setiap tahunnya (lihat tabel 1).

Persaingan yang semakin tajam menuntut Pemerintah Daerah menyiapkan daerahnya sedemikian rupa sehingga mampu menarik investasi, orang dan industri ke daerah. Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasi tergantung dari kemampuan daerah dalam me-

rumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi, Selain itu kemampuan daerah untuk menentukan faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai alat ukur daya saing perekonomian daerah relatif terhadap daerah lainnya juga penting terkait dengan pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur fisik dalam upaya meningkatkan daya tariknya dan memenangkan persaingan (KPPOD, 2003).

Menurut KPPOD faktor-faktor yang menentukan daya tarik suatu daerah terhadap investasi daerah adalah faktor Kelembagaan, Sosial Politik, Ekonomi Daerah, Tenaga Kerja dan Infrastruktur Fisik. Pada tahun 2002 dan 2003 KPPOD melakukan penelitian terhadap 134-200 Kabupaten/Kota di Indonesia untuk mengetahui bobot masing-masing faktor tersebut.

Tabel 1.
Peringkat Daya Saing Negara Menurut World Competitiveness Report
Tahun 1999-2003 dengan Sampel Sebanyak 59 Negara

Negara	1999	2000	2001	2002	2003
USA	1	1	1	1	1
Australia	3	3	3	3	2
Singapura	2	2	3	6	2
Malaysia	9	9	10	6	4
Jepang	10	10	9	6	4
Filipina	12	17	18	18	22
Thailand	16	13	14	13	10
Indonesia	25	24	24	25	28

Sumber: IMD, "World Competitiveness Yearbook"
<http://www02.imd.ch>, Diakses tanggal 11 Desember 2004

Tabel 2.
Bobot Faktor Pemeringkat Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia
Menurut Penelitian KPPOD Tahun 2002-2003

Faktor	2002	2003
Kelembagaan	31%	31%
Sosial Politik	26%	26%
Ekonomi Daerah	17%	17%
Tenaga Kerja	13%	13%
Infrastruktur Fisik	13%	13%

Sumber: KPPOD (2002,2003)

Berdasarkan latar belakang permasalahan mengenai investasi tersebut, maka penelitian ini mencoba untuk: Pertama, melakukan pemeringkatan faktor-faktor dominan yang menentukan daya tarik DIY terhadap investasi berdasarkan persepsi pelaku usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2004. Investasi yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha di suatu daerah. Kedua, bagaimanakah persepsi para pelaku usaha di DIY terhadap pungli dalam pelayanan publik, peradilan, dan aparat penegak hukum? Diyakini bahwa pungli telah menggeroti lingkungan bisnis dan menurunkan daya saing industri Indonesia.

SURVEI LITERATUR

Lingkungan bisnis yang sehat diperlukan untuk menarik investor dalam dan luar negeri. Berbagai survei membuktikan, faktor utama yang mempengaruhi lingkungan bisnis adalah: tenaga kerja dan produktifitas, perekonomian daerah, infrastruktur fisik, kondisi sosial politik, dan institusi. Survei yang dilakukan oleh KPPOD (2002) menunjukkan bahwa institusi merupakan faktor utama yang menentukan daya tarik investasi di suatu daerah, diikuti oleh kondisi sosial politik, infrastruktur fisik, kondisi ekonomi daerah dan produktifitas tenaga kerja. Dalam keadaan normal, potensi ekonomi merupakan faktor utama pertimbangan investasi. Studi terhadap lebih

dari 2,000 perusahaan di lebih dari 60 kabupaten/kota yang dilakukan oleh LPEM FEUI (2000) menemukan bahwa alasan utama di balik peningkatan ketidakpastian usaha yang signifikan berhubungan dengan masih kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan dan mempertahankan iklim bisnis yang menarik.

Banyak studi menemukan bahwa pelaksanaan otonomi daerah sejak 2001 telah memperburuk iklim investasi di Indonesia (misal: Hofman, *et al.* 2003; Smeru, 2001; Ray, 2003, 2002). Masih rendahnya pelayanan publik, kurangnya kepastian hukum, dan berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang tidak "pro-bisnis" diidentifikasi sebagai bukti iklim bisnis yang tidak kondusif. Pelayanan publik yang dikeluhkan terutama terkait dengan ketidakpastian biaya dan lamanya waktu berurusan dengan perijinan dan birokrasi. Ini diperparah dengan masih berlanjutnya berbagai pungutan, baik resmi maupun liar, yang harus dibayar perusahaan kepada para petugas, pejabat, dan preman. Alasan utama mengapa investor masih khawatir untuk melakukan bisnis di Indonesia adalah ketidakstabilan ekonomi makro, ketidakpastian kebijakan, korupsi (oleh pemda maupun pemerintah pusat), perijinan usaha, dan regulasi pasar tenaga kerja (World Bank, 2004).

Studi Kuncoro, *et al.* (2004) menunjukkan masih adanya "grease money" dalam bentuk pungli, upeti dan biaya ekstra yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dari sejak

mencari bahan baku, memproses input menjadi output, maupun ekspor). Lebih dari separuh responden berpendapat bahwa pungli, perijinan oleh pemerintah pusat dan daerah, kenaikan tarif (BBM, listrik, dll) merupakan kendala utama yang dihadapi para pengusaha, terutama yang berorientasi ekspor. Rata-rata persentase pungli terhadap biaya ekspor setahun adalah 7,5%, yang diperkirakan sebesar Rp 3 triliun atau sekitar 153 juta dolar AS! Lokasi yang dituding rawan terhadap pungli terutama jalan raya dan pelabuhan. Selain itu tabel 3 menunjukkan temuan penelitian sebelumnya mengenai hal tersebut.

Secara periodik Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) bekerjasama dengan The Asia Foundation melakukan penelitian untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dominan menentukan daya tarik Kabupaten/Kota terhadap investasi berdasarkan persepsi dunia usaha, kemudian melakukan pemeringkatan dan membuat gambaran daya tarik investasi daerah.

Penelitian yang diberi judul Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia (Persepsi Dunia Usaha) juga bertujuan membuat gambaran kebijakan daerah khususnya yang berhubungan dengan investasi dan kegiatan usaha, serta melihat upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemda untuk meningkatkan daya tarik daerahnya terhadap investasi.

Tabel 3. Studi Empiris Sebelumnya

Peneliti	Periode	Lokasi	Metode	Temuan
KPPOD	2002	134 Kabupaten/Kota di Indonesia.	AHP	Faktor kelembagaan menempati urutan pertama dalam menentukan daya tarik investasi daerah di Indonesia
	2003	200 Kabupaten/Kota di Indonesia.		
SKDU KBI Yogyakarta	Triwulan 1-2004	150 perusahaan besar di DIY.	SBT	Terjadi perlambatan kegiatan usaha di DIY dibandingkan dengan triwulan sebelumnya
			SB	Perkembangan situasi bisnis triwulan1-2004 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya akan tetapi triwulan selanjutnya diperkirakan akan mengalami peningkatan
Ray	2003	23 Kab/kota di Indonesia dengan responden 1014 pengusaha kecil, menengah dan besar.	Analisis deskriptif kuantitatif	Belum ada perbaikan iklim usaha di daerah yang signifikan sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia
LPEM FE UI	2001	60 Kab/Kota di Indonesia dengan responden 1736 perusahaan.	Regional Cost of Doing Business Index	Otonomi daerah justru meningkatkan biaya ketidakpastian berusaha di Kab/Kota di Indonesia
Kuncoro, et al.	2004	6 kluster industri padat karya di Indonesia (Batam, Jabotabek, Bandung, Jepara, Surabaya, Bali).	Multistage-cluster sampling; survei	Banyak hambatan peraturan dan non-peraturan dalam aktivitas ekspor yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Hipotesis "grease money" terbukti.
Kuncoro & Rahajeng	2005	55 pengusaha kecil, menengah, dan besar di DIY	AHP	?

Tabel 4.
Peringkat Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia Menurut Penelitian KPPOD Tahun 2002, 2003

Daerah	Peringkat th 2002 dari 134 Kab/Kota di Indonesia	Peringkat th 2003 dari 44 Kota di Indonesia
Kota Semarang	1	10
Kota Pekalongan	19	43
Kota Denpasar	26	21
Kota Kupang	32	31
Kota Yogyakarta	33	25

Sumber: KPPOD (2002, 2003)

Peringkat daya tarik investasi daerah Propinsi DIY pada tahun 2002 dan 2003 yang diwakili oleh Kota Yogyakarta. Penelitian serupa dilakukan oleh KPPOD pada tahun 2003 dengan sampel yang lebih

banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 156 Kabupaten dan 44 Kota di Indonesia. Untuk DIY, selain diwakili oleh Kota Yogyakarta juga diwakili oleh Kab. Gunungkidul dan Kab. Bantul.

Tabel 5.
Peringkat Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia
Menurut Penelitian KPPOD Tahun 2003 dari 156 Kabupaten di Indonesia

Daerah	Peringkat
Kab. Purwakarta	1
Kab. Cilacap	50
Kab.Klaten	90
Kab. Gunungkidul	119
Kab. Bima	139
Kab. Bantul	141
Kab. Flores Timur	146

Sumber: KPPOD (2003)

Daya tarik Propinsi DIY pada tahun 2003 yang diwakili oleh Kabupaten Gunungkidul berada di peringkat 119 dan Kabupaten Bantul diperingkat 141 dari 156 Kabupaten di Indonesia. Sedangkan Kota Yogyakarta berada di peringkat 25 dari 44 Kota di Indonesia. Perbedaan studi ini dengan KPPOD adalah sebagai berikut: KPPOD menggunakan *expert opinion* sedangkan penelitian ini menggunakan AHP. Selain itu sampel DIY yang diambil oleh KPPOD hanya meliputi Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta, sedangkan penelitian ini meliputi seluruh wilayah DIY terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota.

METODOLOGI

Metode Pengambilan Sampel

Penentuan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dengan metode *quick count* terhadap pengusaha/pelaku usaha. Responden yang dijadikan sampel merupakan pengusaha/pelaku usaha yang memiliki perusahaan kecil, menengah dan besar yang ada di DIY.

Responden yang dipilih adalah pelaku usaha yang memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman dan pemahaman mengenai kegiatan bisnis di Propinsi DIY. Penelitian ini mengutamakan responden

pemilik, pemilik sekaligus pengelola atau pengelola suatu usaha karena penelitian ini menitikberatkan pada persepsi pengusaha terhadap investasi daerah. Studi ini tidak mengutamakan kuantitas responden melainkan kualitas responden sehingga data yang diperoleh dalam kuesioner mempunyai nilai objektivitas yang tinggi sesuai dengan pengetahuan, pengertian, kepercayaan individu tentang objek sikap (kognitif) karena pengalaman. Selain itu, responden yang diwawancara ini mayoritas juga merupakan pengurus asosiasi bisnis yang diharapkan dapat mewakili aspirasi para anggota asosiasinya.

Pengumpulan data persepsi dunia usaha tentang daya tarik serta gambaran investasi daerah dilakukan dengan wawancara mendalam (*in depth interview*) dipandu dengan kuesioner *Analytical Hierarchy Process* (AHP) terhadap 55 responden pelaku usaha yang ada di DIY.

Metode Analisis

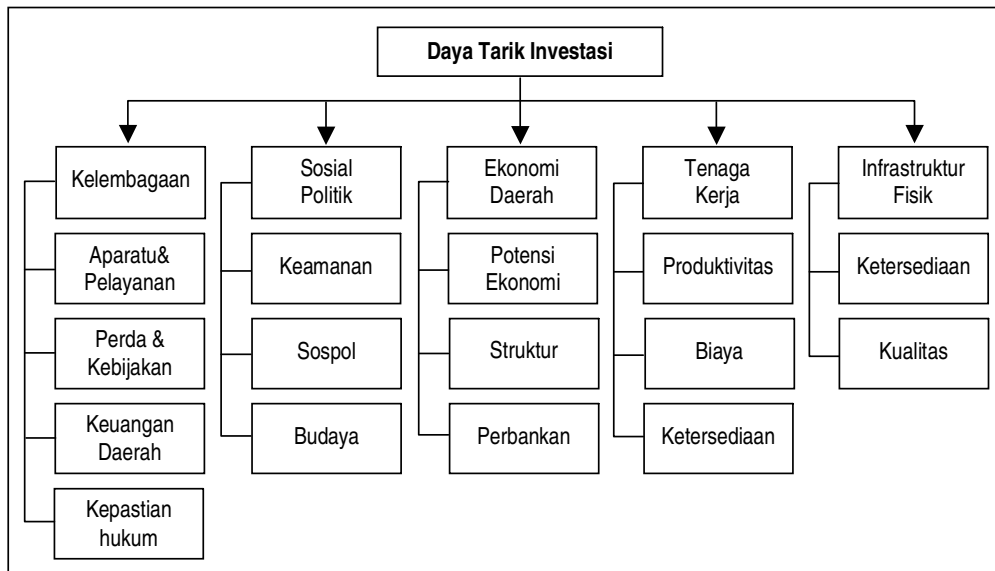
Faktor dan variabel yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan yang digunakan oleh KPPOD dalam penelitiannya mengenai daya tarik investasi daerah tahun 2002,2003. Alat analisis yang digunakan adalah AHP (*Analytical Hierarchy Process*). AHP memecah suatu permasalahan

investasi daerah secara hirarki seperti terlihat pada gambar di atas. Metode AHP yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang dikembangkan oleh Render (2000). Pemilihan alat analisis didasarkan pertimbangan bahwa AHP merupakan salah satu alat atau model pengambilan keputusan dengan input utama adalah persepsi manusia. AHP merupakan salah satu metode yang memecah suatu masalah kompleks ke dalam kelompok-kelompok secara hirarki. Dengan AHP pembobotan suatu faktor atau variabel dapat dilakukan sesuai dengan persepsi manusia sehingga diharapkan mampu menggambarkan kondisi yang senyatanya. Penelitian ini memecah masalah investasi daerah ke dalam beberapa faktor penentu daya tarik investasi daerah berdasarkan faktor penentu daya tarik investasi yang ditetapkan oleh KPPOD ke dalam beberapa variabel (lihat Gambar 1). Alat analisis yang digunakan adalah AHP (*Analytical Hierarchy Process*). AHP memecah suatu permasalahan investasi daerah

secara hirarki seperti terlihat pada Gambar 1.

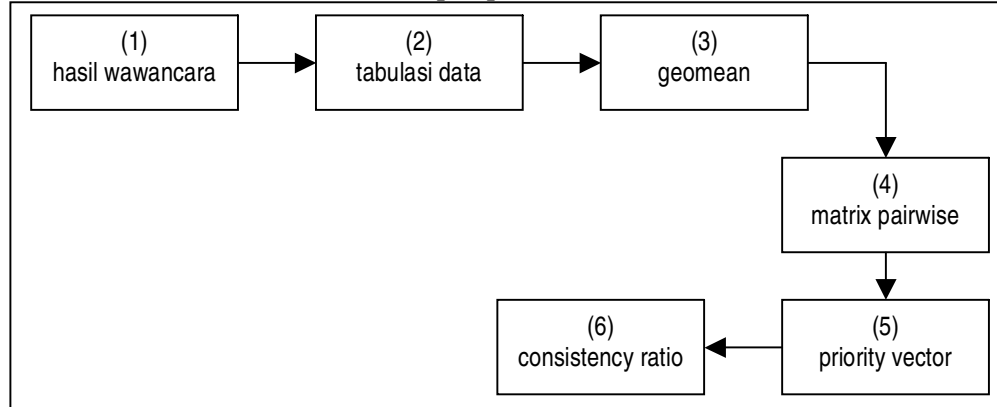
Metode AHP yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang dikembangkan oleh Render (2000). Pemilihan alat analisis didasarkan pertimbangan bahwa AHP merupakan salah satu alat atau model pengambilan keputusan dengan input utama adalah persepsi manusia. AHP merupakan salah satu metode yang memecah suatu masalah kompleks ke dalam kelompok-kelompok secara hirarki. Dengan AHP pembobotan suatu faktor atau variabel dapat dilakukan sesuai dengan persepsi manusia sehingga diharapkan mampu menggambarkan kondisi yang senyatanya. Penelitian ini memecah masalah investasi daerah ke dalam beberapa faktor penentu daya tarik investasi daerah berdasarkan faktor penentu daya tarik investasi yang ditetapkan oleh KPPOD ke dalam beberapa variabel, sebagaimana disajikan dalam Gambar 1.

Gambar 1. Faktor-Faktor Penentu Daya Tarik Investasi Daerah



Sumber: KPPOD (2003)

Gambar 2. Tahapan pembobotan dalam AHP



Sumber: Saaty (2002)

Bobot yang lebih besar dari suatu faktor atau variabel menunjukkan faktor atau variabel tersebut lebih penting dibandingkan dengan faktor atau variabel lainnya dalam menentukan daya tarik investasi suatu daerah menurut persepsi pelaku usaha. Tahapan pembobotan dalam AHP dapat dilihat dalam Gambar 2. Dengan memasukkan unsur persepsi maka metode AHP dapat mengatasi kelemahan utama pada metode pengambilan keputusan yang selama ini sering dikenal dengan kelemahan dalam mengubah data kualitatif ke dalam bentuk kuantitatif. Selain itu AHP juga mampu memberikan prioritas alternatif dan melacak ketidakkonsistenan dalam pertimbangan dan preferensi seorang responden (Saaty, 2002).

Ada empat aksioma/asumsi dasar yang harus dipenuhi agar dapat menggunakan dan memahami metode AHP yaitu:

- ❑ *Reciprocal Comparison*, artinya pengambilan keputusan harus mampu membuat perbandingan dan menyatakan preferensinya. Preferensi tersebut harus memenuhi syarat resiprokal yaitu apabila A lebih disukai daripada B dengan skala X maka B lebih disukai dari A dengan skala $1/X$.
- ❑ *Homogeneity*, artinya preferensi seseorang harus dapat dinyatakan dengan

skala terbatas atau dengan kata lain elemen-elemennya dapat dibandingkan satu sama lain. Jika asumsi ini tidak terpenuhi maka elemen-elemen yang dibandingkan tidak *homogeneous* dan harus dibentuk suatu elemen-elemen yang baru.

- ❑ *Independence*, diasumsikan bahwa kriteria tidak dipengaruhi oleh alternatif-alternatif yang ada tetapi dipengaruhi oleh sasaran secara keseluruhan, artinya perbandingan antar elemen-elemen dalam suatu level dipengaruhi elemen-elemen dalam level di atasnya.
- ❑ *Expectation*, tujuan pengambilan keputusan struktur hirarki diasumsikan lengkap.

Adapun prinsip dasar metode AHP adalah sebagai berikut (Saaty, 1990):

- ❑ *Decomposition*, proses penguraian permasalahan faktor dan variabel sehingga diperoleh suatu hierarki.
- ❑ *Comparative Judgement*, proses penilaian kepentingan relatif terhadap elemen-elemen yang terdapat dalam suatu tingkatan sehubungan dengan tingkatan di atasnya yang disajikan dalam bentuk matriks *pairwise comparison*.

- ❑ *Synthesis of Priority*, setelah diperoleh skala perbandingan berpasangan, maka akan dicari suatu eigen vektor yang menunjukkan sintesis *local priority* pada suatu hierarki.
- ❑ *Logical Consistency*, AHP mentoleransi tingkat konsistensi sebesar kurang dari 10%, apabila lebih dari 10% maka responden dianggap tidak konsisten dalam menjawab pertanyaan maka diperbolehkan melakukan perbaikan atas penilaian yang diberikan.
- ❑ *Matriks Pairwise*, tidak ada yang bernilai 0 dan bilangan negatif sehingga dengan skala 1-9 maka syarat tersebut terpenuhi karena elemen terkecil adalah 1/9 dan terbesar 9.

Arti dari angka 1 s.d. 9 dalam skala pilihan adalah sebagai berikut:

- ❑ Angka 1: artinya sama penting: dua hal yang diperbandingkan sama pentingnya.
- ❑ Angka 3: artinya sedikit (*moderate*) lebih penting: satu hal yang diperbandingkan sedikit (*moderate*) lebih penting dibandingkan dengan komponen lainnya.
- ❑ Angka 5: artinya lebih penting: satu hal yang diperbandingkan lebih penting dibandingkan dengan komponen lainnya.
- ❑ Angka 7: artinya sangat penting: satu hal yang diperbandingkan sangat lebih penting dibandingkan dengan komponen lainnya.
- ❑ Angka 9: artinya sangat penting: satu hal yang diperbandingkan mutlak (*extreme*) lebih penting dibandingkan dengan komponen lainnya.

Sedangkan angka genap 2, 4, 6, 8 merupakan nilai tengah di antara dua nilai keputusan yang berdekatan. Dalam Matriks *Pairwise* berlaku prinsip kebalikan artinya jika untuk aktivitas I mendapat satu angka bila dibandingkan dengan aktivitas j, maka aktivitas j mempunyai nilai kebalikannya bila dibandingkan dengan i.

ANALISIS DAYA TARIK INVESTASI

Profil responden yang disurvei adalah sebagai berikut. Dari target 55 responden pengusaha di DIY, hanya 39 pengusaha yang berhasil diwawancarai sedangkan 11 pengusaha tidak memberikan respon karena tidak bersedia diwawancarai dan berdomisili di luar DIY. Pendidikan terakhir responden penelitian sebesar 54% responden merupakan lulusan S2, 21% lulusan S1, 10% lulusan diploma dan 15% lulusan SMA. Status perusahaan yang diteliti sebesar 79% berstatus perusahaan lokal/daerah yang melakukan kegiatan usaha di DIY, 13% merupakan Perusahaan PMDN (luar daerah), perusahaan BUMN/BUMD dan PMA masing-masing sebesar 5% dan 3%. persentase responden Berdasarkan bidang usaha terbesar adalah bidang kerajinan yang meliputi kerajinan tas, handicraft, kayu, frame, sebesar 25%, kemudian 13% bergerak dalam bidang mebel, Sedangkan bidang IT, percetakan/desain grafis dan jasa boga masing-masing sebesar 8%. Bidang properti, jasa gedung/exhibition, hotel dan consultant masing-masing sebesar 5%.

Dengan menggunakan metode AHP (*Analytical Hierarchy Proccess*), survei ini dapat menghitung bobot faktor dan melakukan pemeringkatan terhadap bobot faktor penentu investasi daerah. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa faktor Kelembagaan memiliki bobot paling besar yakni sebesar 25% kemudian diikuti oleh faktor Infrastruktur Fisik sebesar 24% (lihat tabel 6). Faktor Sosial Politik sebesar 23% dan faktor Ekonomi Daerah menempati urutan keempat yakni sebesar 16%. Terakhir adalah faktor Tenaga Kerja sebesar 12%. Jadi menurut para pelaku usaha, faktor penentu investasi daerah untuk DIY dipengaruhi oleh 3 faktor yang memiliki bobot terbesar yaitu Kelembagaan, Infrastruktur Fisik dan Sosial Politik.

Tabel 6. Faktor dan Variabel Daya Tarik Investasi di DIY

Level Kedua		Level Pertama		Bobot Final (%)
Variabel	Bobot(%)	Faktor	Bobot(%)	
Aparatur dan Pelayanan	0,16	Kelembagaan	0,25	0,04
Perda&Kebijakan Daerah	0,37			0,09
Keuangan Daerah	0,15			0,04
Kepastian Hukum	0,32			0,08
Keamanan	0,42	Sosial Politik	0,23	0,10
Sospol	0,30			0,07
Budaya	0,28			0,07
Potensi Ekonomi	0,60	Ekonomi Daerah	0,16	0,09
Struktur Ekonomi	0,25			0,04
Perbankan	0,15			0,02
Produktivitas Tenaga Kerja	0,60	Tenaga Kerja	0,12	0,07
Biaya Tenaga Kerja	0,28			0,03
Ketersediaan Tenaga Kerja	0,12			0,01
Ketersediaan Infrastruktur Fisik	0,73	Infrastruktur Fisik	0,24	0,18
Kualitas Infrastruktur Fisik	0,27			0,07
TOTAL				1,00

Sumber: Diolah dari data primer

Hal ini menunjukkan perbedaan antara peringkat bobot faktor penentu investasi daerah di DIY dengan peringkat bobot faktor penentu investasi yang dilakukan oleh KKPOD pada tahun 2003 untuk 200 Kabupaten/Kota di Indonesia. Menurut KPPOD faktor yang memiliki bobot terbesar adalah faktor Kelembagaan, diikuti oleh faktor Sosial Politik, Ekonomi Daerah. Kemudian faktor Tenaga Kerja dan faktor Infrastruktur Fisik yang memiliki bobot sama. Faktor-faktor di atas dibedakan menjadi faktor ekonomi dan faktor nonekonomi. Faktor ekonomi terdiri dari faktor Ekonomi Daerah dan faktor Tenaga Kerja, sedangkan faktor nonekonomi meliputi faktor Kelembagaan, Infrastruktur Fisik dan Sosial Politik.

Jadi menurut persepsi pelaku usaha di DIY daya tarik investasi di DIY relatif lebih dipengaruhi oleh faktor nonekonominya terutama Kelembagaan, Infrastruktur Fisik dan Sosial Politik, dibandingkan dengan faktor ekonomi yaitu Ekonomi Daerah dan Tenaga Kerja. Menurut persepsi pelaku usaha di DIY, faktor ekonomi cenderung lebih “controllable” dibandingkan dengan faktor nonekonomi.

ANALISIS PUNGLI DI DIY

Tabel 7 memperlihatkan besarnya pungli tertinggi terjadi pada pelayanan publik oleh aparat birokrasi. Akibatnya, pelaku bisnis lebih senang membayar biaya ekstra untuk mempercepat proses mendapatkan berbagai ijin dan mempercepat berbagai urusan yang berkaitan dengan birokrasi.

Tabel 7. Pungutan Tidak Resmi/Pungutan Liar (%)

JENIS PUNGUTAN TIDAK RESMI / LIAR	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedikit	Tidak Ada
Biaya tidak resmi dalam proses peradilan.	0	84,6	12,8	2,6
Biaya tidak resmi dalam pelayanan oleh birokrasi terhadap dunia usaha. (pengurusan izin usaha; dan berbagai urusan dengan birokrasi lainnya).	5,1	92,3	0	2,6
Pungutan liar oleh oknum aparat keamanan (polisi).	0	56,4	41	2,6
Pungutan liar yang mengatasnamakan kelompok / organisasi kemasyarakatan (pemuda desa, dlsb)	0	12,8	74,4	12,8
Pungutan liar oleh preman	0	2,6	12,8	84,6

Sumber: Diolah dari Data Primer

Biaya tidak resmi dalam proses peradilan tinggi tergolong tinggi kemudian diikuti oleh pungli yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (polisi). Pungli yang dilakukan oleh polisi bersifat insidental dan tidak semua pelaku usaha mengalaminya tergantung dari jenis usaha dan lokasi usaha. Semakin rentan jenis usahanya terhadap keamanan seperti café dan transportasi maka akan semakin sering pungutan liar yang mengatasnamakan keamanan. Dengan kata lain, penjaga gawang hukum di DIY masih belum benar-benar menjadi “sapu yang bersih”.

Menurut 74,4% responden, pungutan liar yang mengatasnamakan kelompok/organisasi kemasyarakatan tergolong sedikit. Kendati demikian, hampir 13% mengeluh tingginya pungli yang dilakukan oleh kelompok/organisasi kemasyarakatan. Pelaku bisnis di DIY biasanya juga menyediakan pos khusus untuk dana sosial kemasyarakatan agar kegiatan usahanya di suatu lokasi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Kepedulian sosial perusahaan terhadap masyarakat diharapkan dapat menimbulkan rasa “handarbeni” masyarakat sekitar terhadap perusahaan sehingga tidak melakukan kegiatan yang sekiranya dapat mengganggu kelancaran proses produksi. Terlebih lagi jika lokasi

usaha terletak di tengah kawasan perkampungan maka dana sosial akan semakin besar misalnya jika ada pembangunan jalan kampung secara swadaya oleh masyarakat maka perusahaan juga ikut menyumbang. Hal ini terjadi secara otomatis karena unsur nilai sosial budaya masyarakat Jawa.

Yang menarik, 84,6% responden menjawab tingkat pungli yang dilakukan oleh preman tidak ada. Kendati demikian, ini perlu diwaspadai mengingat ada sebanyak 2,6% responden yang menjawab pungli oleh preman tinggi dan 12,8% mengaku hanya sedikit dipungut pungli oleh preman.

Hasil survei, dengan demikian, mampu menjelaskan mengapa lingkungan perijinan Indonesia selalu disorot oleh para investor dan pengamat dari luar negeri. Survei UNCTAD (2004) baru-baru ini, dengan judul *World Investment Report 2004*, mencatat peringkat Indonesia berada dalam papan terbawah nomor 2 dari 140 negara dilihat dari indeks kinerja investasi. Ini terlihat dari waktu untuk mengurus ijin investasi masih dikeluhkan terlalu lama (151 hari untuk memulai bisnis baru), prosedur ekspor yang lambat dan kompleks sehingga membuat biaya logistik dan transpor menjadi tidak kompetitif, ditambah korupsi yang masih berlanjut di bea cukai dan pelabuhan.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa menurut persepsi pelaku usaha di DIY, faktor Kelembagaan memiliki bobot terbesar dalam menentukan daya tarik investasi/kegiatan berusaha di DIY. Kemudian diikuti oleh faktor Infrastruktur Fisik, yang ketiga adalah faktor Sosial Politik. Berikutnya adalah faktor Ekonomi Daerah dan yang terakhir adalah faktor Tenaga Kerja (lihat tabel 6). Hal ini menunjukkan perbedaan antara peringkat bobot faktor penentu investasi daerah di DIY dengan peringkat bobot faktor penentu investasi yang dilakukan oleh KKPOD (lihat tabel 2). Ini agak berlainan dengan temuan KKPOD (2003, 2002) bahwa faktor yang memiliki bobot terbesar adalah faktor Kelembagaan, diikuti oleh faktor Sosial Politik, Ekonomi Daerah. Kemudian faktor Tenaga Kerja dan faktor Infrastruktur Fisik yang memiliki bobot sama.

Menurut persepsi pelaku usaha di DIY, bobot ketersediaan infrastruktur memiliki peringkat pertama (lihat tabel 6), kedua adalah keamanan, diikuti oleh perda dan kebijakan, berikutnya di peringkat keempat adalah potensi ekonomi, kepastian hukum, sospol, budaya, produktivitas tenaga kerja dan kualitas infrastruktur fisik. Aparatur dan pelayanan berada di peringkat sepuluh diikuti oleh keuangan daerah, struktur ekonomi, biaya tenaga kerja, perbankan dan ketersediaan tenaga kerja.

Hal ini menunjukkan bahwa daya tarik investasi/kegiatan berusaha di DIY relatif lebih dipengaruhi oleh faktor nonekonominya terutama Kelembagaan, Infrastruktur Fisik dan Sosial Politik, dibandingkan dengan faktor nonekonomi yaitu Ekonomi Daerah dan Tenaga Kerja. Menurut persepsi pelaku usaha di DIY, faktor ekonomi cenderung lebih "*controllable*" dibandingkan dengan faktor nonekonomi.

Implikasi

Untuk meningkatkan daya tarik investasi, tiga hal utama yang diinginkan investor dan pengusaha: penyederhanaan sistem dan perijinan, penurunan berbagai pungutan yang tumpang tindih, dan transparansi biaya perijinan. Tumpang tindih peraturan pusat dan daerah, yang tidak hanya menghambat arus barang dan jasa tapi juga menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, perlu dieliminasi. Barangkali deregulasi dan koordinasi berbagai peraturan daerah dan pusat yang menghambat dunia bisnis merupakan "starting point".

Reformasi peraturan perijinan dapat dimulai oleh pemerintah pusat atau pemda. Beberapa masalah pengawasan yang muncul dengan sistem saat ini adalah: (1) tidak semua Perda diserahkan kepada pemerintah pusat; (2) proses review Perda dinilai lambat karena dibebankan kepada pemerintah pusat; (3) banyak pemda mengabaikan aturan mengenai Perda bermasalah. Oleh karena itu, agenda reformasi yang perlu dilakukan adalah pemerintah provinsi diberi kepercayaan dan wewenang untuk: (1) mengkaji semua Perda dari pemda kabupaten/kota di wilayahnya; (2) bekerjasama dengan pemerintah pusat dan provinsi lain dalam mengembangkan prosedur dan standar pengkajian Perda.

Realitas besarnya pungutan liar yang ada di DIY meskipun dianggap masih dalam taraf wajar, menurut pelaku usaha, menunjukkan lemahnya sistem pengawasan terhadap birokrasi dan lemahnya sanksi terhadap perilaku birokrasi yang merugikan dunia usaha. Oleh karena itu semua pihak baik masyarakat dan LSM yang ada diharapkan ikut serta mengawasi perilaku birokrasi dalam melakukan pelayanan publik, dan jika terbukti ada penyimpangan maka aturan sanksi yang telah ditetapkan harus dijalankan tanpa pandang bulu.

Komitmen Pemda Provinsi DIY yang mencanangkan "*zero tolerance on poor*

governance” nampaknya masih baru sebatas wacana. Pekerjaan rumah terbesar adalah bagaimana membersihkan jalan, peradilan, dan pelayanan publik agar ”merdeka” dari pungli. Agaknya dibutuhkan kesamaan visi dari para pejabat, polisi, aparat birokrasi maupun peradilan dalam menciptakan iklim investasi dan bisnis yang kondusif di DIY. Visi pemda yang “katalistik”, sebagaimana dicantumkan dalam Renstrada 2004-2008, perlu ditindaklanjuti dengan transparansi biaya perijinan, kecepatan pelayanan, bersihnya penjaga gawang hukum, kesamaan kata dan perbuatan dari para pejabat, dan meminimalkan pungli di semua sektor.

Bagi Pemerintah Daerah hendaknya mengembangkan badan promosi investasi yang pro-aktif dan memangkas peraturan-peraturan terkait dengan dunia usaha yang kurang penting serta membuat suatu badan khusus yang tetap tidak berubah-ubah untuk mengelola segala macam urusan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha serta sehingga dapat menyediakan pelayanan yang optimal bagi dunia usaha. Masalahnya, Lembaga/Dinas/Badan promosi di DIY dan mengelola investasi daerah selama kurun waktu 4 tahun ini mengalami beberapa

perubahan. Secara nasional investasi berada di bawah BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) sedangkan untuk tingkat daerah dibentuk BKPM Daerah (Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah). Di DIY BKPM Daerah dihapus diganti menjadi Bapekoinda (Badan Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah). Namun kebijakan Pemerintah Propinsi DIY beberapa waktu lalu yang melikuidasi Bapekoinda menimbulkan keresahan tersendiri bagi dunia usaha di DIY karena implikasi kebijakan dihilangkannya Bapekoinda membawa ketidaktuntasan pada beberapa urusan yang telah terlanjur dikelola oleh Bapekoinda. Setelah Bapekoinda dilikuidasi maka urusan investasi di DIY dikelola Sub Bidang Pemasaran dan Investasi di bawah Bapeda (Badan Perencanaan Daerah) di bawah koordinasi Asisten Sekretaris Daerah I yaitu Asisten Fasilitasi dan Investasi.

Nampaknya tanpa ada reformasi yang mendasar di DIY, pelaku bisnis masih belum merdeka dari pungli. Dengan reformasi seperti ini diharapkan akan terjadi perubahan iklim investasi di DIY. Semoga harapan perubahan yang diinginkan rakyat tidak hanya sekedar mitos.

DAFTAR PUSTAKA

- BKPM, (2005). <http://www.bkpm.go.id>.
- Brooks, Ian dan Jamie Weatherston. (2000). *The Business Environment: Challenges and changes 2nd Ed.*, Financial Times Prentice Hall.
- Deperindag DIY dengan PPE UGM. (2001). *Identifikasi dan Pengembangan Industri di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Penelitian PPE UGM Tidak Dipublikasikan, Yogyakarta: PPE UGM.
- GTZ, (2003). ‘New survey on business climate in the regions’. *Decentralization news*. Issue No. 39. 34 January.
- Harvard Business School Press. (2000). *Harvard Business Review on Business and The Environmen't*, Boston: Harvard Business School Press.
- Hofman, B., Kai, K. and Gunther, G.S., (2003). *Corruption and Decentralization*. International conference on ‘Decentralization and its Impact on Local Government and Society’. May 15-17.

- IMA Chapter DIY. (2004). *Investasi DIY dalam Diskusi Terbatas IMA* di Hotel Santika 20 Desember 2004, Yogyakarta: IMA Chapter DIY.
- KADIN DIY. (2002). *Peta Potensi Ekonomi Yogyakarta: Buku Pegangan Bisnis dan Investasi*, Yogyakarta: KADIN DIY.
- KBI Yogyakarta dengan PSEKP UGM. (2004). *Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Loan To Deposit Ratio (LDR) di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Penelitian PSEKP UGM Tidak Dipublikasikan, Yogyakarta: PSEKP UGM.
- KBI Yogyakarta. (2004). *Laporan Survei Bank Indonesia Yogyakarta: Survei Kegiatan Dunia Usaha Triwulan I 2004*, Yogyakarta: KBI Yogyakarta.
- KBI Yogyakarta. (2004). *Statistik Ekonomi Keuangan-Keuangan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: KBI Yogyakarta.
- KPPOD. (2002,2003). *Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia*, Jakarta: KPPOD.
- Kuncoro, M. (2000). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*, Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, M. (2004). *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Kuncoro, M. (2004). *Trend dan Strategi Menarik Investasi ke Daerah dalam Lokakarya Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha dan Investasi*, Hotel Sahid Raya, Yogyakarta, 9-10 Agustus 2004, Tidak Dipublikasikan.
- Kuncoro, M. et al. (2004), *Domestic Regulatory Constraints to Labor Intensive Manufacturing Exports*, Report for GIAT-USAID, Jogjakarta: Pusat Studi Asia Pasifik UGM.
- LPEM and JETRO, (2003). *Impediments to Doing Business in Indonesia*.
- LPEM FE UI. (2001). *Construction Of Regional Index Of Doing Business In Indonesia*, Jakarta: LPEM FE UI.
- LPEM, 2000. *Construction of Regional Index of Cost of Doing Business in Indonesia*.
- PEMDA DIY dan PADCO Washington DC. (2003). *Rencana Aksi Strategis Pengembangan Perkonomian Propinsi DI Yogyakarta November 2003*, Yogyakarta: PEMDA DIY.
- Permadi, Bambang. (1992). *AHP*, Jakarta: PAU UI.
- QUE IESP UGM. (2003). *Pembobotan Evaluasi Dosen : Policy Studies*, Penelitian QUE IESP UGM Tidak Dipublikasikan, Yogyakarta: QUE IESP UGM.
- Ray, D., (2001). *Inventory of Trade distorting Local Regulations*. Unpublished paper. Partnership for Economic Growth. Jakarta. December.

- Ray, D., (2002). *Notes on Domestic Trade and Decentralization*. Unpublished paper. Partnership for Economic Growth. Jakarta. December.
- Ray, D. (2003). *Regulatory Reform and Local Government in Indonesia*. Paper presented at the 5th IRSA International Conference, 18-19th July, 2003 Bandung Indonesia.
- REDI dan PEG. (2003). *Survei: Persepsi Pelaku Usaha Tentang Otonomi Daerah dan Dampaknya Terhadap Iklim Usaha di Daerah*, Surabaya: REDI.
- Regional Economic Development Institute (REDI), *Survei Persepsi Perilaku Usaha Tentang Otonomi Daerah dan Dampaknya Terhadap Iklim Usaha di Daerah (Studi di 23 Kabupaten/Kota di Indonesia)*.
- Render, Barry dan Ralph M. Stair Jr. (2000). *Quantitative Analysis for Management*, New Jersey: Prentice Hall.
- Saaty, Thomas L. (1990). *Decision Making For Leader: The Analytic Hierarchy Process For Decision in A Complex World*, Pittsburgh: Univesity of Pittsburgh.
- Saaty, Thomas L. (2002). *Hard Mathematics Applied to Soft Decisions dalam Indonesian Symposium Analytic Hierarchy Process II Teknik Industri Universitas Kristen Petra Surabaya*, Tidak Dipublikasikan, Surabaya: Universitas Kristen Petra.
- SMERU, (1999). *Deregulasi Perdagangan Regional: Pengaruhnya terhadap Perekonomian Daerah dan Pelajaran yang Diperoleh*. Desember.
- SMERU, (2001). *Regional Autonomy and the Business Climate: Three Kabupaten Case Studies from North Sumatran*, Jakara, May (mimeo).
- Spiegel, Murray dan Larry Stephens. (1999). *Schaum's Outline Series: Theory and Problem of Statistics 3rd Ed*, McGraw-Hill.
- Usman, S. et al, (2002). *Regional Autonomy and Business Climate: Three Kabupaten Case Studies from West Java*. SMERU Field Paper.